BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai konsekuensi peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut.

Helmi mengatakan bahwa “Negara hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum materiil yang juga disebut Negara hukum modern atau Negara kesejahteraan”.¹ Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya “konsekuensi kewajiban Negara pada semua sektor kehidupan dan penghidupan adalah adanya tanggung jawab Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya”.² Guna memajukan kesejahteraan umum artinya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, agar tujuan tersebut dapat diwujudkan maka perlu diselenggarakan pembangunan nasional yakni upaya pembangunan nasional berkesinambungan, menyeluruh terarah dan

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.16

² *Ibid.*, hlm. 17

terpadu.

Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa “salah satu pelayanan publik yakni penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan”. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur tentang pengertian pelayanan publik yakni:

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan publik dan/atau suatu kegiatan yang dilarang untuk dilakukan kemudian di perbolehkan karena beberapa ketentuan terkait. Perizinan merupakan kegiatan awal untuk memulai usaha. Bagi pemerintah, perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan berguna untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melakukan usahanya. Kewenangan untuk memberikan izin guna menjalankan urusan pemerintahan di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, yang mana menjelaskan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu izin yang dikeluarkan adalah izin depot air minum.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur bahwa “penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif”. Selanjutnya terkait perizinan diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yakni “penyedia Air Minum Komersial wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang membidangi urusan perizinan”. Hal ini bertujuan agar terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Selanjutnya depot air minum dilakukan pengecekan higienis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum ditentukan bahwa:

1. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi usaha depot air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
2. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan masyarakat dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum mengatur bahwa “Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjarah terhadap air minum agar aman dikonsumsi”. Kualitas usaha depot air minum yang dihasilkan juga harus sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas depot air minum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pengecekan higienis air minum yang disertai dengan pemberian izin usaha air minum ini dilakukan dan diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini semua dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan pengawasan. Selanjutnya “oleh sebab itu diperlukanlah suatu perizinan, karena perizinan berguna sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret”.³ Perangkat administrasi Negaramelaksanakan hukum yang baik tersebut memerlukan kewenangan yang terbatas atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pemberian berwenang mengatur

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 208

mengenai perizinannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang telah diberikan, kemudian untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat maka dibentuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yakni: “sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah yaitu terwujudnya yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Non perizinan”.

Hal ini dimaknai bahwa dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintah daerah memberikan pelimpahan kewenangan terkait perizinan kepada pelayanan terpadu satu pintu. Peraturan mengenai pelimpahan kewenangan dalam bidang perizinan, ialah Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengganti Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa “walikota berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan dapat mendelegasikan kepada DPMPTSP”.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa: “tugas dari DPMPTSP membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan”. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu Walikota memberikan kewenangan yang bersifat delegasi kepada DPMPTSP untuk menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Jambi. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, menjelaskan bahwa DPMPTSP berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi dalam DPMPTSP berdasarkan Pasal (2) terdiri dari 8 bagian yaitu:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Penanaman Modal,
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial,
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Lingkungan,
6. Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan,
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas sebagaimana diatur mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambimengatur bahwa DPMPTSP yakni:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahdibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasipenanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinansecara terpadu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai denganbidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal ini maka diketahui bahwa salah satu fungsi DPMPTSP adalah pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yakni bahwa pelayanan perizinan tersebut yang dilakukan DPMPTSP secara terpadu mulai dari tahap penerbitan izin sampai pada tahap pengawasan izin yang dilakukan oleh bidang-bidang yang terdapat di DPMPTSP.

Pasal 1 Ayat (2) huruf f Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mengatur terkait Bidang Supervisi, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hal tersebut, terdiri dari beberapa seksi yaitu:

1. Seksi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi,
2. Seksi bimbingan dan fasilitasi pengaduan masyarakat,
3. Seksi pengolahan data dan pelaporan

Selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mengatur bahwa:

Seksi Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas membantu kepala bidang supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi bidang supervise, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan dan data dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan;
- d. Menindaklanjuti hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- f. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

Berdasarkan dari Pasal tersebut diketahui bahwa salah satu tugas yang dilakukan DPMPTSP adalah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan. Pasal 32 Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi mempertegas adanya pengawasan dari izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP salah satunya

adalah pengawasan terhadap Izin Depot Air Minum di Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi maka dapat diketahui juga bahwa pelayanan perizinan tersebut yang dilakukan DPMPTSP yakni, dari tahap penerbitan izin sampai pada tahap pengawasan izin yang dilakukan oleh bidang-bidang yang terdapat di DPMPTSP.

Setelah dikeluarkan izin, selanjutnya DPMPTSP melakukan pengawasan sebagaimana diatur. Pengawasan dalam hal ini merupakan sebagai aktivitas pokok untuk mengusahakan sedemikian rupa agar perizinan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan pengawasan, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektifitas suatu sistem pengawasan pemerintah.⁴ Berdasarkan dari sifatnya pengawasan ada dua yakni “pengawasan preventif dan represif”. Pengawasan preventif yakni “pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan”.⁵ Selanjutnya pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

⁴ Fitria, Jurnal Ilmu Hukum: *Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Vol. 7 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2014, hlm. 97.

⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 63.

Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.⁶ Pengawasan terhadap izin depot air minum tidak terlepas kaitannya dengan kesehatan, karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat, jika tidak terjadi pengawasan terhadap depot air minum akan berdampak pada kesehatan orang banyak sehingga perlu diperhatikan higeinis dari air tersebut.

Berdasarkan dari dari penelitian awal di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, ada beberapa depot air minum, yakni:

Daftar Nama Depot Air Minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi :

NO	Nama Depot Air Minum	Alamat Depot Air Minum
1	Nadia Water	Jl. KH. A. Majid
2	Ridwan Water	Jl. Siwabessy
3	Abuqua	Jl. Siwabessy
4	Embun Pagi Water	Jl. Depati Parbo
5	Latansa	Jl. Depati Parbo
6	Tantri	Jl. Yulius Usman
7	Al Multazam	Jl. Jendral A. Thalib
8	Mancar Water	Jl. Kapten A. Hasan
9	Nining Water	Jl. Dr. Tazar
10	Srikandi Water	Jl. Dr. Tazar
11	Id Water	Jl. Depati Parbo
12	Jafar Water	Jl. Yulius Usman
13	Zahra Water	Jl. Yulius Usman
14	Kdr Water	Jl. Yulius Usman
15	Apri Water	Jl. Yulius Usman
16	Almadinah Water	Jl. Yulius Usman
17	Muamalah Water	Jl. A Tholib
18	Sinar Bintang Water	Jl. A Tholib
19	Smeansa Water	Jl. A Tholib
20	Dewi Water	Jl. MT. Haryono
21	Sejahtera Water	Jl. Nuradma Dibrata
22	Tmj Water	Jl. Letkol Saman Idris

⁶ *Ibid.*, hlm. 64

23	Azzam Water	Jl. Kolonel Sugiono
24	Pada Elo Water	Perumnas Aur Duri Blok C
25	Yanto Water	Jl. Siwabessy
26	Pada Di Water	Perumnas Aur Duri Blok D
27	Brilian Water	Perumnas Aur Duri Blok D
28	Deny Water	Perumnas Aur Duri Blok E
29	Rahmatullah Water	Perumnas Aur Duri Blok F
30	Pelangi Water	Jl. Raden Perang

*Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi*

Berdasarkan dari data awal yang dikumpulkan diketahui bahwa semakin meningkat pelaku usaha depot air minum di Kota Jambi salah satunya di Kecamatan Telanaipura maka diperlukan pengawasan. Pengawasan merupakan upaya untuk menanggulangi apabila ditemukan permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai peraturan. suatu. Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Depot Air Minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?
2. Bagaimana sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah berwenang terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah berwenang berwenang terhadap usaha depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang melakukan penyimpangan dalam ketentuan-ketentuan perizinan berusaha.

2. **Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan dalam hal:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dapat menambah referensi khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dari pemerintah terhadap izin yang telah dikeluarkan dalam hal ini adalah izin depot air minum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha depot air minum di Kota Jambi khususnya wilayah Kecamatan Telanaipura.
- 2) Memberikan masukan/saran bagi Pemerintah tentang upaya

apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini telah menyusun beberapa definisi operasional yang digunakan sebagai dasar penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan

Adirian Sutedi mengatakan bahwa “Salah satu dari kebijakan dalam penerapan prinsip-prinsip pelayanan perizinan adalah dengan melaksanakan pengawasan”.⁷ Pengawasan adalah monitoring atau pengendalian yang ditujukan untuk menjamin agar pelaku usaha dan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menajadai kewenangan daerah otonomi.”

3. Izin

Adrian Sutedi mengatakan bahwa “izin (*vergunning*)

⁷ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik Cet Ke-III*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17

adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan”.⁸ Izin bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Depot Air Minum

Berdasarkan kajian Pustaka di peroleh pengertian dari depot air minum adalah “usaha industri yang melakukan proses pengolahan air menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah penyaringan (*filtrasi*) dan desinfeksi”.⁹ Selanjutnya Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Usaha depot air minum ditentukan bahwa “Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi usaha depot air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah tugas pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan perizinan oleh DPMPTSP.

⁸ *Ibid.*, hlm.168

⁹ *Depot Air Minum Isi Ulang*, <http://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html>, diakses pada 22 Juli 2020

Salah satu perizinan yang dimaksud adalah izin depot air minum yang menjual dan mengolah air untuk dapat langsung dijual dan diminum oleh konsumen di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

Izin memiliki beberapa sudut dari segi Hukum, salah satunya adalah dari segi Hukum Administrasi Negara.

Dari sudut Hukum Administrasi Negara, Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Disisi lain, perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk peraturan. Peraturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan.¹⁰

Sjachran Basah memberikan pengertian, “izin adalah pembuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.¹¹ Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Izin dapat juga di artikan sebagai dispensasi atau

¹⁰ Ivan Fauzani Raharja, dan Ratna Dewi, *Jurnal Tentang Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013

¹¹ *Ibid.*, hlm. 167

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹² Menurut N.M. Spelt dan J.B.J Ten Berge, Izin dalam arti sempit adalah “pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang- undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk”.¹³ Izin adalah pembolehan bersyarat dengan syarat-syarat pembolehan dari peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2. Teori pengawasan

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.¹⁴ Menurut Sujamto pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.¹⁵ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah “suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”.¹⁶ Pengawasan dari segi hukum merupakan “penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang

¹² *Ibid*, hlm. 168

¹³ *Ibid*, hlm. 170

¹⁴ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

¹⁵ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 78

¹⁶ Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113.

menimbulkan akibat hukum”.¹⁷

Pengawasan dapat juga di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan agar dapat tercapai. Ini berkernaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan seperti kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan sehingga dapat diberikan sanksi, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah, termasuk juga keputusan-keputusan kepala daerah dan peraturan-peraturan Daerah, menilik sifatnya dapat dibagi dalam 2 macam:

- a. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan.
- b. Pengawasan Represif Pengawasan represif adalah pengawasan yang bersifat mengebalikan keadaan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap keputusan yang dinilai bertentangan.¹⁸

Pengawasan Preventif adalah pengawasan dimana dimulai dari izin itu belum ada sampai izin akan ada sedangkan pengawasan Represif adalah pengawasan saat izin telah ada sampai izin tersebut tidak ada karena dicabut atau habis masa berlakunya.

¹⁷ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

¹⁸ Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

3. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.¹⁹ Selanjutnya Penegakan hukum pada hakikatnya menurut Satjipto Raharjo yaitu merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak.²⁰

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran penegakan hukum dilaksanakan untuk mengatasi ketidakpatuhan hukum.²¹ Penegakan hukum itu dilaksanakan melalui pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan sarana hukum yang bersifat administratif, pidana, dan keperdataan dengan maksud agar peraturan perundang-undangan itu dipatuhi.

Hal ini karena penegakan hukum itu merupakan suatu proses yang melibatkan banyak faktor. Keberhasilan penegakan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

¹⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 291.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 291

²¹ *Ibid.*, hlm. 292

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Menurut pendapat J.B.J.M ada beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum yaitu:

- a) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b) Ketentuan pengecualian harus dibatasi secara minimal.
- c) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
- d) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).²³

Philipus M. Hadjon mengemukakan instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif.²⁴ Di sini yang akan dibahas lebih jauh

143.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.

²³ Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm. 295

²⁴ *Ibid.*, hlm. 296.

mengenai penegakan sanksi dalam Hukum

Administrasi Negara. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Tipe Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah “penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat”.²⁶ Hal ini dimaknai dengan menganalisis dan mengevaluasi fakta yang terdapat di dalam masyarakat atau terjadi di lapangan berdasarkan peraturan yang ada.

Ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap meliputi:²⁷

- a) Pendekatannya pendekatan empiris;
- b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial /hukum;
- c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner);
- e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f) Teori kebenarannya korespondensi;
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti.²⁸

Penelitian yuridis empiris memaparkan fakta dan menjelaskannya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 297

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 124

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125

dalam hal ini membahas mengenai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran umum secara rinci mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai peranan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang telah memiliki izin. Setelah itu hasil penelitian diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah- masalah yang dibahas dimana hal tersebut berkaitan dengan tugas dan jabatan yang dimiliki di dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Telanaipura yang berjumlah 30.

b. Informan

Menurut Martha E dan Kresno S informan adalah “pihak yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang

permasalahan yang diangkat oleh peneliti”.²⁹ Jadi informan dalam penelitian ini adalah Dian Wahyu Djati selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

c. Tata Cara Penarikan Sampel

Dari populasi tersebut kemudian ditentukan sampelnya.

Terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penentuan sampel antara lain:

- a. Dengan semakin besar jumlah populasi akan terlihat semakin perlu adanya sampel.
- b. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat menghasilkan dan yang diinginkan. Yaitu dapat menggambarkan keseluruhan populasi.³⁰

Penentuan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili populasi terhadap masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu.³¹ Adapun yang menjadi sampel berjumlah 8 (delapan) pelaku usaha usaha depot air minum di Kecamatan Telanaipura.

²⁹ Marta E dan Kresno S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 80

³⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm., 117.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014, hlm. 128.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dalam penelitian lapangan. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, dimana didalam wawancara terbuka responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan penelitian ini. Informasi yang diinginkan dalam penelitian ini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah kepala seksi pengawasan dari DPMPTSP. Wawancara dilakukan kepada informan dan sampel. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang didapat dengan mencari informasi langsung dari responden yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai data tambahan dilakukan studi dokumen di perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dalam bentuk pernyataan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan,** meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha,** meliputi teori kewenangan pemerintah, dan tinjauan tentang teoritis.
- BAB III Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Depot Air Minum Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi,** mengenai pembahasan mengenai Bentuk Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan Sanksi Administrasi diberikan oleh pejabat pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
- BAB IV Penutup,** bab ini di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari analisis hasil penelitian